

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Hamzah, Amir.2020. *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research Dilengkapi Contoh, Proses dan Hasil 6 Pendekatan Penelitian Kualitatif*,Malang : Literasi Indonesia.

Junaidi, Veri. 2013.*Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*,Jakarta : Perludem.

Surbakti, Ramlan dan H. Fitrianto. 2015.*Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*,Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.

Suswanto, Gunawan. 2016. *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, Jakarta :Erlangga.

Sumber Jurnal :

Cahya, Kadek dan S. Wibawa. 2019. *Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*. Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, November 2019.

Murafer, Yokobus Richard. 2018. *Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura*. Jurnal & Pemerintahan. Vol.2, No.2, Desember 2018.

Nurkinan. 2018. *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019*. Jurnal Politikom Indonesiana. Vol.3 No.1, Juli 2018. Hal. 39.

Primadi, A., D. Efendi dan Sahirin. 2019. *Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawan Pemilu Partisipatif*. Jurnal of Political Issues. Volume 1 Nomor 1 Juli 2019.

Sandi, Jhon Retei Alfri dan Suprayitno. *Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. Vol. 13, No. 1.

Saufi, A., A. Faiz dan M. Rezky Yanuar. *Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu dan Pilkada di Tengah*

Pandemi COVID-19. Journal of Character Education Society. Vol. 3, No. 3, Oktober 2020.

Solihah, R., A. Bainus dan I. Rosyidin. 2018. *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*. Jurnal Wacana Politik. Volume 3. Nomor 1 Maret 2018. Hal : 15.

Sumber Dokumen Lembaga :

Panduan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2017. Hlm. 18.

Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 Menjelang Tahapan Kampanye.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WaliKota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sumber Website :

Sulsel.Bawaslu.go.id (7 Desember 2020). IKP Sulsel Jelang Pungut-Hitung, Tiga Wilayah Masuk Kategori Kerawanan Tinggi. Diakses pada <https://sulsel.Bawaslu.go.id>.3 Februari 2021.

<http://Makassar.Bawaslu.go.id/halaman/detail/visi/-dan-misi> tanggal 9 Juni 2021 jam 22:22

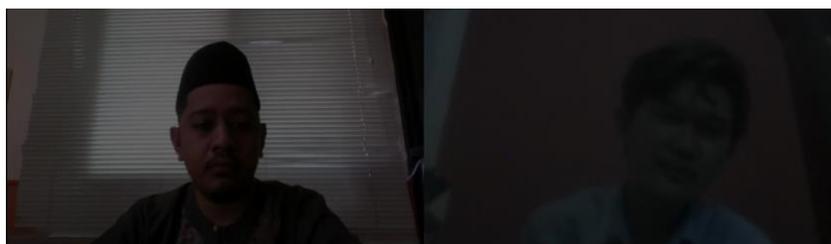
<http://Makassar.Bawaslu.go.id/halaman/detail/tugas-wewenang-dan-kewajiban> tanggal 9 Juni 2021 jam 22:23

<https://www.Bawaslu.go.id/id/berita/apresiasi-pengawas-daerah-Bawaslu-gelar-Bawaslu-award-2018> tanggal 5 Agustus 2021Jam 18:51

LAMPIRAN



Dokumentasi Wawancara dengan Nursari S.H,M.H Ketua Bawaslu
Kota Makassar.

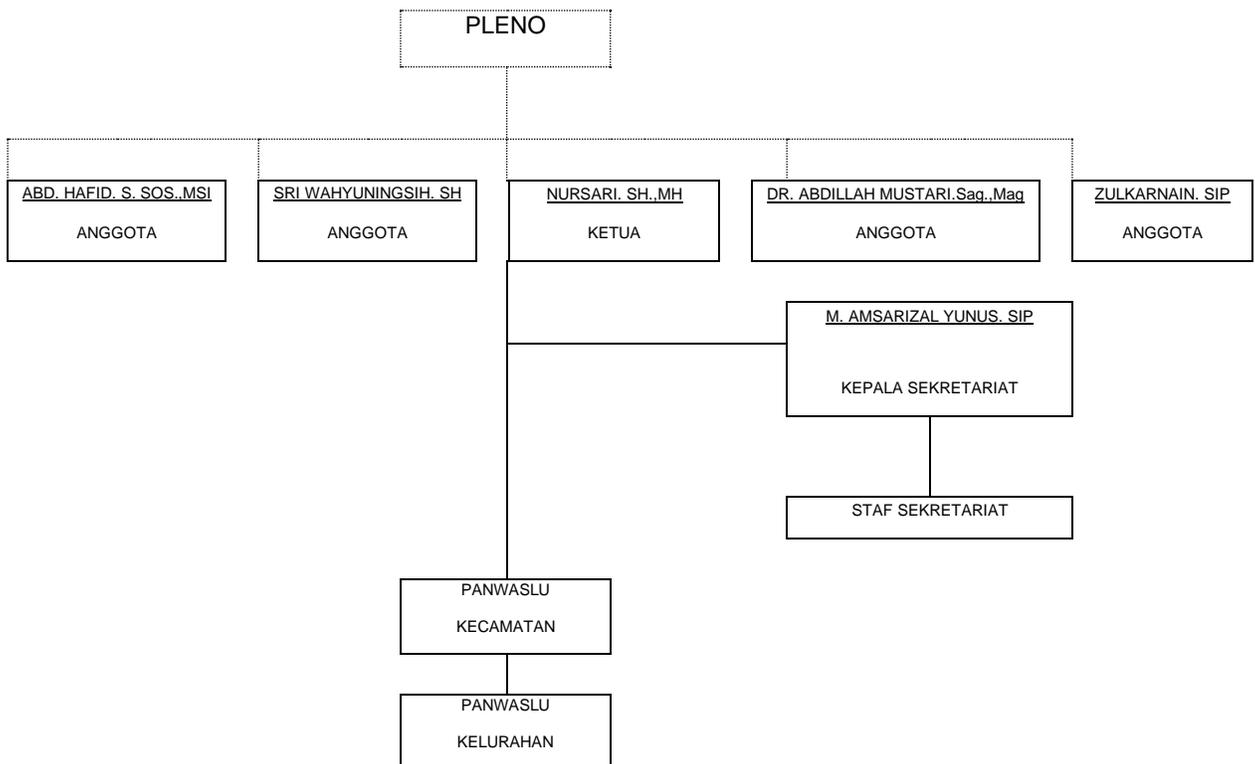


Dokumentasi Wawancara dengan Zulkarnain S.IP Kordinator Divisi
Pengawasan Bawaslu Kota Makassar.



Dokumentasi Wawancara dengan Muhammad Ali Mabhan S.H Ketua PD Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kota Makassar.

Struktur Organisasi Bawaslu Kota Makassar



Sumber : Data Bawaslu Kota Makassar

Struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang telah di atur bahwa jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah (3) atau lima orang (5) dengan komposisi keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang dan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa berjumlah 1 (satu) orang. Struktur Bawaslu Kota Makassar berjumlah 5 anggota terdiri dari Bapak ABD. HAFID. S. SOS.,MSI menjabat sebagai Kordinator Divisi Sumber Daya Manusia Data dan Informasi , Ibu SRI WAHYUNINGSIH. SH menjabat sebagai Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bapak NURSARI. SH.,MH menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Makassar, Bapak DR. ABDILLAH MUSTARI.Sag.,Mag menjabat sebagai Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, dan Bapak ZULKARNAIN. SIP menjabat sebagai Kordinator Divisi Pengawasan. Pada pemilihan Walikota tahun 2020 jumlah anggota panwaslu kecamatan di Makassar sebanyak 45 orang dan jumlah anggota panwaslu kelurahan sebanyak 153 orang. Selain itu terdapat juga kepala sekretariat dan staf sekretariat dalam struktur Bawaslu Kota Makassar.